

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 September 2017/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL, LAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
SUB UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI
DAN USAHA MIKRO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARUM KUSUMAWATI
2. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3. NHK : 468220

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	350.384.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 366 m2/- m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 144.204.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/81 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 206.180.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	85.500.000
1. MOBIL, SUZUKI JEEP Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
2. MOTOR, SUZUKI MOTOR BEBEK Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
3. MOTOR, HONDA 2013 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
4. MOTOR, HONDA MOTOR MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	----
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	465.884.000



III. HUTANG

Rp.

311.920.983

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

153.963.017

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **7 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.